

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI  
SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH  
DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Disusun oleh :

**PUTU PRITA CAHYANI**  
NIM. 09182436/ Perpetaan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA  
2013**

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Batasan Permasalahan.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) .....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	9
A. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Pemberdayaan Masyarakat .....	9
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	16
3. Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	25
B. Kerangka Pemikiran.....	27
C. Pertanyaan Penelitian .....	31
BAB III. METODE PENELITIAN.....	32
A. Format Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH .....	38
A. Letak, Batas, dan Luas Wilayah.....	38
B. Penggunaan Tanah .....	44
C. Jumlah Penduduk .....	45
D. Mata Pencarian dan Pendapatan Penduduk.....	46
E. Jumlah Penduduk Miskin.....	51
BAB V. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH .....	53
A. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	53

	Hal
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) .....	53
2. Dinas Pekerjaan Umum (PU).....	54
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	55
4. Pemerintah Desa .....	56
5. Peserta Kegiatan Pemberdayaan .....	57
B. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	62
1. Dekonsentrasi Kewenangan.....	62
2. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	68
3. Penyediaan Akses Kredit Melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) .....	81
 BAB VI. PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN DAN ALTERNATIF SOLUSINYA .....	 94
A. Permasalahan Pemberdayaan .....	94
B. Alternatif Solusi .....	98
 BAB VII. PENUTUP.....	 100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	102
 Daftar Pustaka .....	 103
 Lampiran	

## INTISARI

Menurut data sensus BPS tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali adalah 166.200 jiwa, dan Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali sebesar 45.900 jiwa. Masyarakat miskin tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk hidup layak, rumah yang dihuni tidak nyaman dan tidak sehat. Hal ini membuat pemerintah berinisiatif untuk melaksanakan program berbasis pemberdayaan. Kementerian Perumahan Rakyat menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama Nomor 08/SKB/M/2010 dan Nomor 07/SKB/XII/2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah. Sertipikasi dipilih sebagai kegiatan pemberdayaan karena mengingat fungsi dari sertipikat yang dapat memberikan modal bila diagunkan ke pihak kreditur. Modal yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh peserta kegiatan pemberdayaan untuk membangun atau memperbaiki rumah tinggalnya menjadi lebih layak huni. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah secara swadaya melalui sertipikasi hak atas tanah di Kabupaten Buleleng.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik penjarangan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang berasal dari studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah secara swadaya melalui sertipikasi hak atas tanah di Kabupaten Buleleng melibatkan pihak-pihak seperti: Kantor Bappeda, Dinas PU Kabupaten Buleleng, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Pemerintah Desa lokasi kegiatan pemberdayaan, dan peserta kegiatan pemberdayaan. Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Buleleng dilakukan melalui dekonsentrasi wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat melalui sertipikasi hak atas tanah, dan penyediaan fasilitas kredit oleh desa adat berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini tidak lepas dari permasalahan yang terjadi ditiap tahapan kegiatan. Solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan melakukan kerjasama dan komunikasi antara instansi pelaksana kegiatan pemberdayaan dengan pemerintah desa lokasi kegiatan pemberdayaan.

**Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bali dikenal sebagai daerah pariwisata yang menyajikan berbagai keindahan, namun di balik semua keindahan yang tampak masih banyak penduduk Bali yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Bali 166.200 jiwa. Masyarakat miskin tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk hidup layak, rumah yang mereka huni tidak nyaman dan tidak sehat. Penghasilan mereka tidak cukup untuk membangun atau memperbaiki rumahnya. Oleh karena itu pemerintah harus ikut memikirkan, agar masyarakat miskin yang dikategorikan berpenghasilan rendah bisa berdaya guna dan mampu untuk hidup layak dan sehat dalam lingkungan permukiman yang tertata rapi dan teratur. Pembangunan yang berbasiskan pemberdayaan merupakan pilihan utama untuk mengatasi persoalan dasar termasuk masalah perumahan. Program pengentasan perumahan tidak layak huni yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara multisektoral.

BPN RI bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) berupaya untuk mensejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertifikasi

Hak Atas Tanah. Upaya tersebut dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama No. 70/PKS/DS/2010 dan No. 13/SKB-500/XII/2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Membangun Rumah secara Swadaya Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.

Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Legalisasi Tanah dalam program Kementerian Perumahan Rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah kegiatan sertifikasi hak atas tanah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibiayai oleh pemerintah melalui DIPA BPN RI. Kegiatan ini bermaksud memberikan penguatan aset hak milik atas tanah agar dapat dipergunakan dalam memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan/perbankan sehingga mereka dapat membangun rumah atau memperbaiki rumah tempat tinggalnya.

Kabupaten Buleleng adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Menurut data sensus tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng 624.125 jiwa dan 45.900 jiwa atau 7,35% hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng menduduki posisi tertinggi di Provinsi Bali. Tingginya jumlah penduduk miskin menjadi alasan Kabupaten Buleleng sebagai salah satu lokasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan

masyarakat Buleleng untuk memiliki rumah yang lebih layak, nyaman dan sehat.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dilihat seharusnya masyarakat memiliki rumah yang layak, karena rumah merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi rumah dan menjadi tempat masyarakat itu berlindung. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Padahal masyarakat tersebut memiliki tanah yang tanpa disadari dapat memberikan modal. Modal dapat diperoleh ketika tanah itu sudah memiliki sertifikat dan sertifikatnya dijadikan jaminan hutang ke bank/lembaga keuangan lainnya. Disini permasalahan yang muncul tidak sebatas ketidaksadaran masyarakat akan potensi yang mereka miliki, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan pihak kreditur untuk memberikan pinjaman. Setelah pihak kreditur memberikan pinjaman, masyarakat harus bersedia membagi penghasilannya yang rendah untuk mencicil hutang. Hal ini menjadi persoalan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.

**C. Batasan Permasalahan**

Penelitian ini dilakukan hanya pada masyarakat yang menjadi peserta Program Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah secara swadaya melalui sertifikasi hak atas tanah di Kabupaten Buleleng.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan tentang pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah melalui Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Legalisasi Tanah dalam Program Kementerian Perumahan Rakyat Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Bagi BPN RI, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.



### E. Kebaruan (*Novelty*)

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan mengenai Karya Ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka dibuat perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian yang relevan

No	Judul Nama dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi Program Pembangunan Perumahan Bersubsidi Oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Studi Kasus : Pada Humas dan Protokol Kementerian Perumahan Rakyat) Aida Indriani 2010 Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Untuk mengetahui dampak sosialisasi kebijakan program pembangunan perumahan bersubsidi yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan Rakyat RI.	Kualitatif, studi kasus	1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian Perumahan Rakyat RI dalam melakukan program pembangunan perumahan bersubsidi dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah, media cetak dan media elektronik. 2. Sosialisasi terlaksana melalui kegiatan seminar, diskusi, talk show, dan rapat kerja yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat kurang mampu tentang rumah yang sehat dan layak huni. Sehingga mereka tertarik untuk mengikuti apa yang diprogramkan Kementerian Perumahan Rakyat.

1	2	3	4	5
2	Dampak Pemberdayaan Masyarakat Eksodan Di Desa Taggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Bayu Wisnu Murti 2011 Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	<p>1. Untuk mengetahui bagaimana pola pemberdayaan masyarakat eksodan Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat eksodan.</p> <p>2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat eksodan.</p>	Kualitatif, deskriptif	<p>1. Pola pemberdayaan masyarakat telah berjalan baik, namun hasilnya belum optimal.</p> <p>2. Dampak pemberdayaan masyarakat, berdampak bagi yang mengupayakan maupun kepada yang diupayakan. Pada saat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen maupun dengan masyarakat eksodan.</p>
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Justiana Nuriati Purba 2008 Tesis Universitas Sumatra Utara	Untuk menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan studi tentang Program Bantuan Pembangunan Nagori/ Kelurahan (BPN/K) di Kecamatan Panombeian Panei.	Kualitatif, deskriptif.	Masyarakat di lokasi penelitian sebenarnya memiliki antusias dan respon yang tinggi dalam proses pembangunan yang memang berkenaan langsung dengan kebutuhan pokoknya. Keterlibatan dalam proses perencanaan sudah dianggap baik yang terlihat dari tingginya tingkat antusias masyarakat. Aspek yang terlibat dalam proses perencanaan adalah aspek sosial dan ekonomi. Dalam proses pelaksanaan yang berperan adalah aspek budaya dan ekonomi. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis ketika pelaksanaan program BPN/K berlangsung masyarakat tidak terlibat.

1	2	3	4	5
4	Dinamika Perumahan Kebutuhan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus: Penghuni Rumah Tipe Kecil Griya Pagutan Indah, Mataram) Nanang Pujo Raharjo 2010 Tesis Universitas Diponegoro Semarang	Untuk menggambarkan dinamika pemenuhan kebutuhan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah penghuni rumah tipe kecil.	Kualitatif, deskriptif	Terdapat hubungan erat antara kebutuhan perumahan, pemenuhan kebutuhan dan kemampuan penghuni dalam memenuhinya. Hubungan tersebut saling mempengaruhi, saling mendorong untuk meningkat dan tidak dapat terlepas maupun berdiri sendiri.
5	Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali Putu Prita Cahyani, 2013	Untuk mengetahui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.	Kualitatif, fenomenologi	1. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan adalah Bappeda, Dinas PU, Kantah Kab. Buleleng, Pemerintah desa lokasi kegiatan, dan Peserta kegiatan pemberdayaan 2. Bentuk kegiatan pemberdayaannya berupa dekonsentrasi wewenang, peningkatan kemandirian masyarakat melalui sertifikasi hak atas tanah, dan penyediaan akses kredit melalui LPD oleh desa adat. 3. Permasalahan yang dihadapi selama kegiatan tersebut berlangsung di tiap tahapan kegiatan. 4. Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah desa.

Dari keempat hasil penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengkaji kegiatan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah melalui sertipikasi hak atas tanah di Kabupaten Buleleng yang sebelumnya belum pernah diteliti. Metode penelitian yang dipilih untuk penelitian ini metode kualitatif fenomenologi berbeda dengan metode penelitian yang dipilih oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang dominan memilih metode kualitatif deskriptif.

Jadi penelitian yang dilakukan ini memiliki kebaruan pada hubungan sertipikasi dengan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini tentang kegiatan pemberdayaan ditinjau dari sisi kegiatan sertipikasi hak atas tanah. Kajian penelitian menjadi berbeda karena penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kegiatan pemberdayaan tanpa melibatkan adanya kegiatan sertipikasi. Ini berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah baru dicanangkan sejak tahun 2010.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah melalui sertifikasi hak atas tanah di Kabupaten Buleleng adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Pemerintah Desa yang menjadi lokasi kegiatan pemberdayaan, dan Peserta Kegiatan Pemberdayaan.
2. Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Buleleng dilakukan melalui dekonsentrasi wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat melalui sertifikasi hak atas tanah, dan penyediaan fasilitas kredit oleh desa adat berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
3. Permasalahan muncul di tiap tahap pelaksanaan kegiatan yaitu:
  - a. Pra sertifikasi, kurang pemahamnya masyarakat akan tujuan kegiatan pemberdayaan serta pemaknaan yang kurang pada pembiayaan kegiatan. Kegiatan verifikasi yang tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga ada beberapa masyarakat yang menjadi calon peserta kegiatan pemberdayaan telah memiliki rumah tinggal yang layak huni.

- b. Sertifikasi, masih adanya berkas permohonan yang belum lengkap sehingga untuk melengkapi berkas tersebut membutuhkan waktu tambahan. Kurangnya komunikasi antara aparat desa dengan peserta tentang pemasangan tanda batas sebelum pengukuran dan saat petugas ukur datang tanda batas belum terpasang. Hal ini menghambat kegiatan pengukuran karena diperlukan waktu untuk melakukan pemasangan tanda batas.
  - c. Pasca Sertifikasi, tidak terlaksananya kegiatan pembinaan dan pendampingan akibat kurangnya komunikasi antar instansi yang bertanggung jawab pada kegiatan ini. Tidak adanya kerjasama antara pemerintah pelaksana kegiatan pemberdayaan di Kabupaten Buleleng dengan salah satu pihak kreditur, sehingga tidak semua peserta menggunakan sertifikatnya. Hal tersebut diakibatkan kurangnya kepercayaan pihak kreditur terhadap kemampuan mengangsur peserta kegiatan dan rasa kurang percaya diri dari peserta untuk menggunakan sertifikatnya.
4. Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dalam rangka memperlancar kegiatan pemberdayaan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya koordinasi antara pihak instansi pelaksana kegiatan pemberdayaan dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kantor Bappeda dan Dinas PU Kabupaten Buleleng perihal kegiatan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah secara swadaya melalui sertifikasi hak atas tanah.
2. Pentingnya sosialisasi terkait dengan pembinaan dan pendampingan agar peserta kegiatan pemberdayaan lebih memahami tujuan dari penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan.
3. Dilakukannya kerjasama antara pemerintah pelaksana kegiatan pemberdayaan dengan salah satu pihak kreditur, agar peserta kegiatan pemberdayaan lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-buku

- Adi, Isbandi Rukminto, (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Peberdayaan Masyarakat*, Edisi Revisi 2012, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Beilharz, P., (2002). *Teori-Teori Sosial*, Cet. Ke- 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2011, *Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2011*, BPS Kabupaten Buleleng, Singaraja.
- Creswell, J. W., (2010). *Reserch Design*, Cet. Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler, (2007). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Cet. Ke-2, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Hariyono, P., (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota Dan Perubahan Paradigma*, Cet. Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kartasasmita, G., (1996). *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, (Pidato Kebudayaan disampaikan Pada Peringatan Hari Jadi Ke-28 Pusat Kesenian Jakarta- Taman Ismail Marzuki), Jakarta, 19 November 1996.
- \_\_\_\_\_, (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cisendo, Jakarta.
- Moleong, L. J., (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-11, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-21, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudjiati, (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 3, September 2011.



- Prijono, Onny. S dan Pranaka A.M.W, (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Center For Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- Sairin, Sjafari, (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*, Cet. Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saleh, Deden Dani, (2007). *Berdaya Memberdayakan Masyarakat*, Widya Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 8, Maret 2007.
- Soetomo, (2011). *Pemberdayaan Masyarakat : Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Cet. Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suparlan, P., (1995). *Kemiskinan di Perkotaan*, Ed. Ke-3, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sutaryono, (2008). *Pemberdayaan Setengah Hati*, Lapera Pustaka Utama, Klaten.
- Sutedi, A., (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutopo, H.B., (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Usman, S., (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wardan, A. S., (2009). *Peduli Kemiskinan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

## II. Sumber dari internet

- Ali, Achmad, (2012). *Saatnya Bali Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*, <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=1&id=6074>, diunduh tanggal 27 Desember 2012.
- Badan Pertanahan Nasional, (2010). *Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPN RI dan Kementerian Perumahan Rakyat RI*, <http://www.bpn.go.id/Beranda/Berita---artikel/Berita/Penandatanganan-Perjanjian-Kerjasama-BPN-RI-dan--K.aspx>, diunduh tanggal 15 September 2012.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, (2012). *Jumlah dan %tase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2008-2010*, [http://bali.bps.go.id/tabel\\_detail.php?ed=615004&od=15&id=15](http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=615004&od=15&id=15), diunduh tanggal 27 Desember 2012.
- CIB Report Publication, (2009). *Sustainable Slum Upgrading in Urban Area*, <http://cibworld.xs4all.nl/dl/publications/W110Sustainable.pdf>, diunduh tanggal 27 Desember 2012.
- Institut Pertanian Bogor (2012). *Respository IPB*, <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/53475/BAB%20IV%20Gambaran%20Umum%20Lokasi%20Penelitian.pdf?sequence=5>, diunduh tanggal 10 Juni 2013.
- Muzaki, (2012). *Kriteria Kemiskinan di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)*, <http://www.sudahtahu.com/2012/02/21/331/kriteria-kemiskinan-di-indonesia-menurut-badan-pusat-statistik-bps/#ixzz2J8l63BSG>, diunduh tanggal 27 Januari 2013.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng, (2012). *Pemerintah Kecamatan Sukasada*, <http://sukasada.bulelengkab.go.id/?sik=kantor&bid=a89f820414704934864f6ac0d534d8ed>, diunduh tanggal 10 Juni 2013.
- Srikuntjoro, (2012). *Sertipikat Tanda Bukti Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, <http://srikuntjoro.wordpress.com/2012/08/06/sertipikat-tanda-bukti-hak-atas-tanah-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah/>, diunduh tanggal 16 September 2012.
- Sukesi, (2012). *Lansia Berkualitas*, <http://www.sukesi17.com/alg/wp-content/uploads/2012/02/LANSIA-BERKUALITAS.pdf>, diunduh tanggal 1 Agustus 2013.
- Zafar, Saeful, (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan Melalui Pemanfaatan Reforma Agraria Serta Larasita Dalam Rangka Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat*, <http://id.scribd.com/doc/58528943/PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-BIDANG-PERTANAHAN-MELALUI-PEMANFAATAN-REFORMA-AGRARIA-SERTA-LARASITA>, diunduh tanggal 15 September 2012.

### III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/Permen/M/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekonsentrasi.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Pra dan Paska Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan rendah Membangun Rumah Swadaya.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 08/SKB/M/2010 dan Nomor 07/SKB/XII/2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.

Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Pengendalian Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 70/PKS/DS/2010 dan Nomor 13/SKB-

500/XII/2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.